

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN UPAYA PENYELENGGARA UNTUK
MEWAKILI PEMODAL DALAM MENGAJUKAN GUGATAN
DERIVATIF TERHADAP DIREKSI PENERBIT PADA PENAWARAN
EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM MELALUI LAYANAN
URUN DANA (*EQUITY CROWD FUNDING*)**

Joshua Jujur Jonatan*, Nindyo Pramono**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian kuasa kepada Penyelenggara dalam mewakili Pemodal untuk mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi Penerbit beserta upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal terjadi kerugian bagi perseroan akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi Penerbit dalam kegiatan layanan urun dana penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham (*equity crowdfunding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang responden yaitu Kepala Bidang Hukum dan Pengawasan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada prinsipnya ketentuan pemberian kuasa dari Pemodal kepada Penyelenggara untuk mengajukan gugatan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 memang kurang efektif, dikarenakan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 merupakan ketentuan untuk sistem *e-proxy* yang bertujuan untuk menggantikan mekanisme RUPS. Adapun, upaya yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara untuk mendapatkan kuasa dari Pemodal untuk mengajukan gugatan derivatif adalah dengan menghubungi Pemodal satu persatu sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. Upaya tersebut seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Penyelenggara karena Penyelenggara sudah menerapkan prinsip *Know Your Costumer*. Terlebih lagi, Penyelenggara juga harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) untuk melakukan pemeriksaan fisik pada perusahaan Penerbit agar disesuaikan dengan laporan keuangan Penerbit.

Kata Kunci: *Equity Crowdfunding*, Gugatan Derivatif, Pasar Modal.

*Mahasiswa Pasca Sarjana pada Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND REMEDIES OF THE ORGANIZER TO REPRESENT INVESTORS IN FILING A DERIVATIVE LAWSUIT AGAINST THE DIRECTORS OF THE ISSUER IN THE OFFERING OF EQUITY SECURITIES IN THE FORM OF SHARES THROUGH EQUITY CROWD FUNDING SERVICES

Joshua Jujur Jonatan*, Nindyo Pramono**

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of granting power of attorney to the Organizer in representing the Investor to file a derivative lawsuit against the directors of the Issuer and the remedies that can be made by the Organizer in the event of a loss to the company due to errors and/or negligence of the directors of the Issuer in the crowdfunding service activities of equity securities offerings in the form of shares (equity crowdfunding) as referred to in Article 64 paragraph (3) of POJK 57/2020 of the Financial Services Authority Regulation Number 57/POJK.04/2020 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services.

This research uses normative-empirical research with descriptive research. This research uses qualitative data analysis. This research uses primary data obtained by conducting interviews with 1 (one) respondent, namely the Head of Legal and Supervision of the Indonesian Crowdfunding Services Association (ALUDI).

The conclusion of this research is that in principle the provision of granting power of attorney from the Investor to the Organizer to file a derivative lawsuit as referred to in Article 64 paragraph (3) POJK 57/2020 is indeed less effective, because Article 64 paragraph (3) POJK 57/2020 is a provision for the e-proxy system which aims to replace the GMS mechanism. Meanwhile, the efforts that can be made by the Organizer to obtain the power of attorney from the Investor to file a derivative lawsuit is to contact the Investor one by one so that it complies with the provisions as required by Law Number 40 of 2007. These efforts should be maximized by the Organizer because the Organizer has implemented the Know Your Customer principle. Moreover, the Organizer should also have a Standard Operating Procedure (SOP) to conduct a physical inspection of the Issuer's company to match the Issuer's financial statements.

Keywords: *Equity Crowdfunding, Derivative Lawsuits, Capital Market.*

*Graduate Student at Master of Laws Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University

**Lecturer at Master of Law Faculty, Gadjah Mada University